

**DINAMIKA PERJUANGAN KESETARAAN GENDER MASYARAKAT URBAN  
(MEMAHAMI GERAKAN SOSIAL INTERNATIONAL WOMEN'S DAY  
DI KOTA SEMARANG)**

**Bayu Anang Prihanto, Ambar Widaningrum**

*Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Gadjah Mada.*

[bayuanang47@mail.ugm.ac.id](mailto:bayuanang47@mail.ugm.ac.id) , [ambarwid@ugm.ac.id](mailto:ambarwid@ugm.ac.id)

**Abstrak**

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender melahirkan gerakan sosial yang berfokus pada isu-isu pengarusutamaan gender. Salah satu gerakan sosial berbasis gender dikenal dengan *International Women's Day*. Belum tercapainya kesetaraan gender di Indonesia menyebabkan pentingnya kajian yang menjelaskan tentang tahapan gerakan sosial *International Women's Day*, sehingga dapat diketahui penyebab belum tercapainya tujuan gerakan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menjelaskan tahapan gerakan sosial dan pola gerakan sosial *International Women's Day* Semarang sebagai pelaku Gerakan Sosial Baru (GSB). Terdapat dua penyebab yang membuat IWD Semarang belum mencapai tujuan. Pertama, belum adanya organisasi yang tersentral yang menjadi pedoman aktivitasnya. Kedua, kegagalan gerakan dalam menentukan tujuan dari gerakan, sehingga aksi-aksi yang dilakukan hanya bersifat seremonial. Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini menekankan pentingnya kelembagaan gerakan sosial dengan melakukan kerjasama dengan para aktor gerakan sosial, terutama dalam penyusunan rencana kerja, jangka pendek, menengah dan rencana jangka panjang gerakan. Peran pemerintah diperlukan terutama pada fasilitasi terkait dengan penguatan aktivitas advokasi kesetaraan gender.

**Kata Kunci:** Gerakan Sosial, *International Women's Day*, Kesetaraan Gender, Pengarusutamaan Gender

**Abstract**

*Gender inequality has given rise to social movements that focus on solving gender problems. One of the gender-based social movements is International Women's Day. The lack of gender equality in Indonesia has led to the importance of studies that explain the stages of the International Women's Day social movement, so that we can find out the reasons why the movement's goals in Indonesia have not been achieved. This study uses a descriptive qualitative method by explaining the stages of social movements and social movement patterns of International Women's Day Semarang as actors in the New Social Movement (GSB). There are two reasons why IWD Semarang has not achieved its goals. First, there is no centralized organization to guide its activities. Second, the movement's failure to determine the goals of the movement, so that the actions carried out were only ceremonial. Based on these findings, this study emphasizes the importance of social movement institutions by collaborating with social movement actors, especially in preparing work plans, short, medium and long-term movement plans. The government's role is needed, especially in facilitation related to strengthening gender equality advocacy activities.*

**Keyword:** Social Movement, *International Women's Day*, Gender Equality, Gender Mainstreaming

## Pendahuluan

Kesetaraan gender tidak lagi sebatas diskursus yang berkembang di masyarakat, namun telah berevolusi menjadi sebuah gerakan yang secara kontinyu diperjuangkan di masyarakat. Meskipun berbagai konsep dan gerakan pengarusutamaan gender telah menyebar di masyarakat, namun hingga kini berbagai gerakan sosial masih terus berusaha untuk mewujudkan konsep kesetaraan gender, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Menurut dokumen Pembangunan Manusia Berbasis Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, usaha untuk mencapai kesetaraan gender merupakan perwujudan dari salah satu tujuan SDGs dalam menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia, dimana kemajuan dari suatu negara tidak dapat dapat terwujud tanpa adanya kesetaraan gender. Hal ini tersirat dari berbagai usaha dari berbagai negara dalam memastikan segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, khususnya di Indonesia.

Salah satu dampak dari ketidaksetaraan gender adalah munculnya kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu isu utama ketika membahas mengenai kesetaraan gender. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan 2023, terdapat 4.322 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.371 kasus pada tahun 2022. Rinciannya, ada 2.098 kasus kekerasan di ranah personal, 1.276 kasus di ranah publik, dan 68 kasus di ranah negara.

Jika ditilik dari aspek latar belakang ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di Indonesia, argumen yang seringkali muncul adalah basis kultur atau budaya patriarki yang telah lama hidup dan dianut oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya negara ini, dan implikasi budaya patriarki masih kuat keberadaannya hingga saat ini. Bahkan, dampak dari budaya patriarki yang ada di Indonesia masuk ke dalam *system blame approach*, dimana

permasalahan diakibatkan oleh sistem yang tidak sesuai dengan keinginan ataupun harapan.<sup>1</sup> Berbagai permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, stigma mengenai perceraian, dan angka pernikahan dini terjadi karena budaya patriarki yang memiliki kecenderungan untuk memperbolehkan hal-hal tersebut terjadi dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga membiarkan pengulangan kasus yang terus terjadi.

Dalam peta sejarah pengarusutamaan gender, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender inilah yang melahirkan berbagai gerakan sosial. Tujuan dari gerakan sosial ini untuk membawa informasi mengenai ketidakpastian dan ambiguitas kepada masyarakat. Fungsi utama dari gerakan sosial adalah secara kolektif memahami situasi eksternal yang problematis, memperluas kesadaran bersama, dan membuat tindakan kolektif yang dapat menciptakan perubahan sosial.<sup>2</sup> Contoh dari gerakan sosial adalah gerakan ideologi, budaya, perdamaian, etnisitas, gender dan seksualitas. Meskipun pada Orde Baru terjadi berbagai keterbatasan dalam melakukan gerakan, namun akibat reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah menguatkan gerakan sosial untuk muncul sebagai bentuk ekspresi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan.<sup>3</sup>

Gerakan sosial dipandang sebagai sekumpulan individu yang mengorganisir diri dalam mendorong atau menolak berbagai atau beberapa jenis perubahan sosial yang terjadi dan bersama-sama memperjuangkan perubahan sosial.<sup>4</sup> Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa gerakan sosial menjadi

<sup>1</sup> Sakina, Ade Irma (2017). 'Menyoroti budaya patriarki di Indonesia', *Share: Social Work Journal*, vol. 7, no. 1, hal. 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.

<sup>2</sup> Oman Sukmana, Konsep dan teori gerakan sosial (Intrans Publishing, 2016).

<sup>3</sup> Prasisko, Yongky Gigih (2016). 'Gerakan Sosial Baru Indonesia: reformasi 1998 dan proses demokratisasi Indonesia', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, vol. 3, no. 2, hal. 9–16. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>

<sup>4</sup> Oman Sukmana, Konsep dan teori gerakan sosial (Intrans Publishing, 2016).

sebagai sarana dalam melakukan advokasi kebijakan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Clayton tentang gerakan sosial *Black Lives Matter*.<sup>5</sup> Gerakan sosial *Black Lives Matter* terjadi akibat kekerasan yang dilakukan polisi kepada Freddie Gray dan berujung kematian. Akibatnya, unjuk rasa dilakukan dan hashtag *#blacklivesmatter* bermunculan. Peristiwa yang cukup terbaru fenomenal terjadi ketika pembunuhan George Floyd yang dilakukan oleh empat petugas kepolisian pada 25 Mei 2020 di Amerika Serikat dan menyebabkan berbagai protes. Protes yang dilakukan menuntut untuk diberikannya hak secara setara terhadap kaum kulit hitam dan kehidupan yang layak. Lalu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Larasati yang membahas mengenai gerakan Aliansi Laki-Laki Baru yang berusaha untuk membongkar konstruksi maskulinitas dalam masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, gerakan sosial bertransformasi menjadi gerakan sosial baru yang lebih cenderung membahas mengenai isu-isu tentang lingkungan, gerakan perdamaian, feminisme, hingga hak-hak binatang termasuk ke dalam gerakan sosial baru. GSB menolak konsep mengenai perjuangan kelas dan konsep kelas sebagai agen perubahan. GSB tidak untuk mencapai tujuan ekonomis-material, cenderung mengutamakan tujuan non-material, seperti gerakan perdamaian, lingkungan, dan feminisme yang dikategorikan sebagai isu-isu yang menjadi fokus dari gerakan sosial baru.

Konsep gerakan sosial menjadi sebuah konsep yang masih memiliki keterkaitan dengan advokasi kebijakan, dimana gerakan sosial menjadi bagian penting dalam advokasi kebijakan. Gerakan sosial dapat dipandang

sebagai sebuah dorongan dari masyarakat melalui tindakan-tindakan kolektif kepada penyusun kebijakan dalam menyusun, menghapus, atau mengubah suatu kebijakan, seperti yang dilakukan di Brazil pada masa pemerintahan Presiden Bolsonaro, perempuan di Brazil melakukan tuntutan atas penurunan hak-hak perempuan yang terjadi.<sup>7</sup> Gerakan sosial dipandang sebagai sebuah alternatif yang efektif dalam mendesak perubahan kebijakan.<sup>8</sup> Gerakan sosial *International Women's Day* dipandang sebagai sebuah gerakan sosial yang turut mengambil peran dalam mendorong pemerintah untuk memenuhi berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan pemenuhan kesetaraan gender di Indonesia.<sup>9</sup> Gerakan ini merupakan perayaan pencapaian ekonomi, sosial, kultural, dan politik dari perempuan. *International Women's Day* dirayakan pertama kali pada tanggal 28 Februari 1909 di New York oleh Partai Sosialis Amerika dan demonstrasi yang dilakukan perempuan di Petrograd, Rusia pada 8 Maret 1917 memicu Revolusi Rusia dan diresmikan sebagai *International Women's Day* oleh PBB pada tahun 1977 dalam rangka memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian.<sup>10</sup>

*International Women's Day* atau Hari Perempuan Internasional merupakan sebuah perayaan global yang merayakan pencapaian-pencapaian dari perempuan di bidang sosial,

<sup>5</sup> Clayton, Dewey M., (2018) 'Black Lives Matter and the Civil Rights Movement: A Comparative Analysis of Two Social Movements in the United States', *Journal of Black Studies*, vol. 49, no. 5, hal. 448–80. <https://doi.org/10.1177/0021934718764099>.

<sup>6</sup> Ira Larasati and Pudji Astuti, 'Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru: membongkar konstruksi maskulinitas untuk mewujudkan keadilan gender', *Journal of Politics and Government Studies*, vol. 8, no. 02 (2019), hal. 211–20.

<sup>7</sup> Olivia Cristina Perez, Joana Tereza Vaz de Moura, and Caroline Bandeira de Brito Melo, 'Protests for Women's Rights and against the Bolsonaro Administration', *Latin American Perspectives* (SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 2023), p. 0094582X221150442.

<sup>8</sup> Dimpos Manulu, 'Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea, Sumatera Utara', *Populasi*, vol. 18, no. 1 (2016).

<sup>9</sup> Yaka, Ö. (2019). Gender and framing: Gender as a main determinant of frame variation in Turkey's anti-hydropower movement. *Women's Studies International Forum*. <https://doi.org/10.1016/J.WSIF.2019.03.002>.

<sup>10</sup> Ruthchild, Rochelle Goldberg, 'From West to East: International Women's Day, the First Decade', *Aspasia*, vol. 6, no. 1, *Berghahn Journals*, hal. 1–24. <https://doi.org/10.3167/asp.2012.060102>.

ekonomi, kultural, dan politik, serta sebagai sebuah wadah dalam melakukan berbagai tindakan kolektif guna mencapai kesetaraan gender. Perayaan secara ekspresif dilakukan dengan melakukan berbagai tuntutan sesuai dengan isu yang sedang berkembang, serta menggunakan berbagai media, salah satunya poster.<sup>11</sup> *International Women's Day* tidak terbatas pada negara, kelompok, atau organisasi tertentu. Namun, dalam perjalanannya *International Women's Day* tidak terlepas dari pengaruh politik.<sup>12</sup> Contoh, politisasi gerakan *International Women's Day* dapat terlihat pada gerakan sosialis Moravia, Republik Ceko yang memanfaatkan *International Women's Day* sebagai alat untuk bersaing dengan partai sosialis lainnya.<sup>13</sup>

Tuntutan yang dilakukan *International Women's Day* setiap tahunnya semakin berkembang dan menyesuaikan dengan isu gender setiap tahunnya yang dibahas secara global, maupun menyesuaikan dengan isu lokal. Pada tahun 2022, gerakan sosial *International Women's Day* di Kota Semarang mengangkat tema "Bebas Merdeka Tanpa Diskriminasi dan Penindasan". Gerakan *International Women's Day* Semarang menganggap bahwa sampai pada tahun 2022 perempuan masih mengalami diskriminasi dan penindasan melalui banyaknya kasus kekerasan, stigmatisasi, dan diskriminasi yang dialami perempuan. Berbagai kasus yang terjadi menggambarkan bahwa tujuan dari kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi

hal yang perlu diperjuangkan. Berdasarkan akun Instagram @iwdsemarang, YLBHI -LBH Semarang mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 melalui konsultasi dan aduan, terdapat 19 kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan dengan jenis kekerasan yang beragam.

*International Women's Day* (IWD) Semarang dipilih sebagai objek studi karena IWD Semarang merupakan turunan dari perkembangan gerakan gender IWD Jakarta pada tahun 2018.<sup>14</sup> IWD Semarang muncul sebagai salah satu gerakan berbasis gender yang pertama di Kota Semarang. Studi ini memfokuskan tentang bagaimana sebuah gerakan gender atas nama *International Woman's Day* di Kota Semarang dalam menjalankan organisasinya dan perannya sebagai sebuah gerakan sosial dalam mengatasi isu kesetidaksetaraan gender. Selanjutnya, studi ini mengevaluasi gerakan tersebut berdasarkan tahapan gerakan sosial yang dicetuskan oleh Macionis.<sup>15</sup> Dengan demikian studi ini diharapkan dapat membantu menemukan titik lemah dari sebuah gerakan dan menjadi bahan evaluasi bagi gerakan agar dapat terus eksis serta berkembang dalam masyarakat. Selain itu, dengan melibatkan IWD Semarang sebagai studi kasus, dinamika gerakan gender di tingkat lokal dapat diketahui serta seberapa jauh peran konkret yang dimainkan oleh gerakan lokal dalam membawa perubahan.

Melihat fenomena IWD Semarang sebagai suatu gerakan baru di Kota Semarang, studi ini juga menganalisis tentang aktivitas-aktivitas gerakan dalam menghadapi dan menanggapi ketidaksetaraan gender di tingkat lokal. Pemilihan IWD Semarang menjadi penting karena gerakan ini merupakan representasi dari upaya kolektif masyarakat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan di tingkat

<sup>11</sup> Fauzi, Aziz, Andayani Andayani & Muhammad Rohmadi (2021). 'Measuring the Use of Politeness in Language on the Demonstration Poster International Women's Day 2020 (Pragmatic Studies)', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 8, no. 6, hal. 77–88. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i6.2649>.

<sup>12</sup> Edwards, Louise (2016). 'International Women's Day in China: Feminism Meets Militarised Nationalism and Competing Political Party Programs', *Asian Studies Review*, vol. 40, no. 1, Taylor & Francis, hal. 89–105.

<sup>13</sup> Hana Krutílková, 'International Women's Day and its role in the consolidation of the female socialist worker's movement in Moravia before 1914', *UR Journal of Humanities and Social Sciences*, no. 2 (19) (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021), hal. 77–99.

<sup>14</sup> Rademacher, H. (2020). Transnational social movement organizations and gender mainstreaming bureaucracies: an event history analysis, 1981-1998. *International Journal of Sociology*, 50, 445 - 472. <https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1812259>.

<sup>15</sup> John J. Macionis, *Sociology*. (Global Edition) (Pearson, 2018).

lokal, yang mencerminkan tantangan umum dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

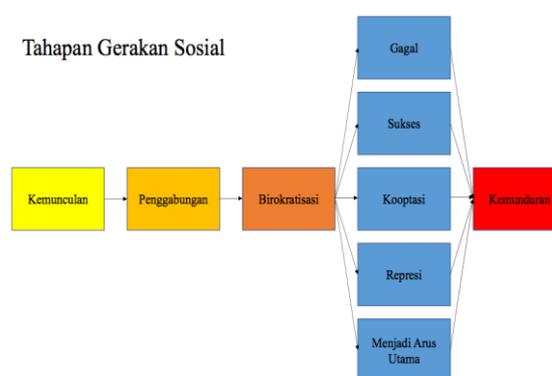
Pentingnya teori Gerakan Sosial Baru (GSB) dalam menjelaskan fenomena IWD Semarang juga menjadi perhatian penulis.<sup>16</sup> GSB cenderung membahas isu-isu non-material, seperti kesetaraan gender, dan menolak konsep perjuangan kelas. Dengan meletakkan posisi IWD Semarang sebagai bagian dari GSB, karakteristik gerakan ini bisa diketahui perkembangan dan kontribusinya dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Secara umum, studi atau kajian-kajian sebelumnya tentang gerakan *International Women's Day* terbatas pada beberapa gerakan sosial di dalam *International Women's Day* secara spesifik.<sup>17</sup> Oleh karena itu, studi ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menjelaskan mengenai pola gerakan *International Women's Day* secara keseluruhan, yang kemudian merujuk pada bagaimana gerakan tersebut mengalami kemundurannya. Untuk itu, kajian ini secara berurutan berusaha menjawab 2 (dua) aspek penting sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah tahapan gerakan sosial *International Women's Day* Semarang? Kedua, bagaimanakah pola gerakan sosial *International Women's Day* Semarang sebagai pelaku Gerakan Sosial Baru

(GSB) berdasarkan karakteristik Gerakan Sosial Baru?

### ***International Womens Day* sebagai Gerakan Sosial Baru (GSB)**

Gerakan sosial memiliki beberapa tahapan dalam rangka mencapai tujuan dari gerakan sosial. Macionis melalui hasil kajian Blumer (1969), Mauss (1975), dan Tilly (1978) menyimpulkan bahwa terdapat empat tahapan dari gerakan sosial.<sup>18</sup> Empat tahapan tersebut tergambar dalam Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Gerakan Sosial menurut Macionis (2017) berdasarkan hasil kajian Blumer (1969), Mauss (1975), dan Tilly (1978)

<sup>16</sup> Doug McAdam and Sidney Tarrow, 'The political context of social movements', *The Wiley Blackwell companion to social movements* (Wiley Online Library, 2018), hal. 17–42.

<sup>17</sup> Fauzi, Aziz, Andayani Andayani & Muhammad Rohmadi (2021). 'Measuring the Use of Politeness in Language on the Demonstration Poster International Women's Day 2020 (Pragmatic Studies)', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 8, no. 6, hal. 77–88. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i6.2649>; Hwang, S., & Wu, W. (2019). Social capital and feminist power: promoting gender mainstreaming in Taiwan. *International Feminist Journal of Politics*, 21, 724 - 745. <https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1606724>; Felmler DH, Blanford JJ, Matthews SA, & MacEachren AM (2020) The geography of sentiment towards the Women's March of 2017. *PLoS ONE* 15(6): e0233994. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233994>.

Pertama, kemunculan. Di tahap ini hadir berdasarkan persepsi bahwa gerakan sosial muncul karena ada suatu keadaan atau fenomena yang sedang tidak baik. Ketidakpuasan muncul dan kemudian melahirkan gerakan sosial. Gerakan ini nantinya muncul dan membawa sebuah isu ke ranah publik untuk diperjuangkan. Gerakan yang lebih kecil cenderung terbatas hanya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu tertentu.

<sup>18</sup> John J. Macionis, *Sociology*. (Global Edition) (Pearson, 2018).

Kedua, penggabungan (*coalesce*). Di tahapan ini suatu gerakan sosial mulai mengembangkan dirinya untuk muncul ke ruang publik, dimana pemimpin dari gerakan sosial mulai menentukan kebijakan dalam gerakan untuk memutuskan bagaimana taktik dari gerakan, merekrut anggota baru, dan membangun moral dalam gerakan sosial. Pada tahapan ini gerakan mulai terlibat dalam aksi-aksi kolektif, seperti demonstrasi untuk mendapatkan perhatian media dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu yang diangkat oleh gerakan.<sup>19</sup> Gerakan juga memungkinkan untuk membentuk suatu koalisi dengan gerakan lainnya untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan.<sup>20</sup>

Ketiga, adalah birokratisasi. Pada tahapan ini, gerakan sosial cenderung mengendurkan dominasi kepemimpinan dengan munculnya anggota yang lebih berkualitas dalam membagi peran dengan pemimpin organisasi dan secara tidak langsung gerakan sosial akan cenderung bersifat birokratis. Tahap birokratisasi dapat merugikan gerakan sosial apabila pemimpin gerakan hanya berfokus pada membangun organisasi tanpa mempertimbangkan momentum semangat gerakan sosial yang mulai berubah dan selanjutnya gerakan akan menyusut.<sup>21</sup>

Keempat, adalah kemunduran. Pada tahapan ini, sebuah gerakan sosial akan mengalami kemunduran yang ditandai dengan berkurangnya pengaruh yang diberikan gerakan sosial kepada masyarakat.

Menurut Miller, ada lima tahap penyebab dari kemunduran gerakan sosial, antara lain : *Pertama* Sukses, yakni ketika gerakan sosial telah berhasil dalam mencapai tujuan. penyebab kemunduran gerakan sosial oleh keberhasilan ditentukan oleh tingkat kompleksitas dari tujuan gerakan sosial sebagai berikut. *Kedua* Gagal, yakni ketika gerakan sosial mengalami kegagalan apabila organisasi tidak mampu menangani ekspansi gerakan yang terjadi begitu cepat akibat keberhasilan organisasi dalam menyebarkannya dan akibat ketegangan yang terjadi di dalam organisasi. Ada dua penyebab dari kegagalan yang terjadi di dalam organisasi, yakni *factionalism* dan *encapsulation*. *Factionalism* terjadi ketika organisasi yang sudah mulai tumbuh dan bersifat terbuka dan dapat menerima berbagai orang dari berbagai golongan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Organisasi mulai dikendalikan oleh berbagai faksi yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. *Encapsulation* adalah proses dimana anggota menjadi terisolasi dari gerakan yang lebih luas dikarenakan mereka datang untuk berbagi banyak kebiasaan dan kebudayaan yang sama dan ideologi mereka menjadi lebih mirip satu sama lain dan menjadi suatu organisasi yang lebih kaku. *Ketiga* Kooptasi, ketika gerakan sosial bisa mengalami kemunduran apabila organisasi sangat bergantung pada pihak otoritas atau bergantung kepada pemimpin yang kharismatik melalui kooptasi. Kooptasi terjadi ketika pemimpin dari gerakan sosial lebih sering berdialog dengan otoritas atau target gerakan dibandingkan dengan komponen dari gerakan sosial. *Keempat* Represi, yakni ketika terjadi ketika otoritas bertindak atas nama pihak berwenang untuk mengendalikan atau menghancurkan gerakan sosial. Tindakan represif dapat didefinisikan sebagai hal yang sah oleh negara, meskipun dianggap sebagai tindakan yang tidak pernah sah dari perspektif gerakan sosial. *Kelima* Arus utama, ketika sebuah organisasi

<sup>19</sup> Sari, M., Jatiningsih, O., & L. (2018). Green and Clean as Issue on Women's Movement in Surabaya.. <https://doi.org/10.2991/ICSS-18.2018.47>.

<sup>20</sup> Hwang, S., & Wu, W. (2019). Social capital and feminist power: promoting gender mainstreaming in Taiwan. *International Feminist Journal of Politics*, 21, 724 - 745. <https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1606724>.

<sup>21</sup> Frances Fox Piven and Richard Cloward, *Poor people's movements: Why they succeed, how they fail* (Vintage, 2012).

sudah diadopsi menjadi arus utama, dan eksistensinya tidak lagi dibutuhkan.<sup>22</sup>

Gerakan Sosial Baru (GSB) merupakan pendekatan teoritis baru dalam teori gerakan sosial. Menurut Fuadi & Tasmin, gerakan sosial lama berfokus pada ideologi politik tertentu dan bersifat gerakan yang emansipatoris.<sup>23</sup> GSB lebih berfokus pada kaitan isu-isu kebudayaan dan simbolik dengan identitas, serta menerima keberagaman ide maupun pandangan pragmatis dalam menciptakan sistem partisipasi politik yang masif dalam proses pengambilan keputusan. Keanggotaan dalam gerakan sosial baru juga bersifat terbuka tanpa adanya pembatas.

Menurut Pichardo, terdapat empat karakteristik dari GSB. *Pertama*, tujuan dan ideologi.<sup>24</sup> Gerakan Sosial Lama cenderung berfokus pada redistribusi ekonomi, dimana GSB cenderung menekankan pada kualitas dan gaya hidup. GSB mempertanyakan tujuan yang materialistik dari masyarakat industrial dan struktur representasi demokrasi yang membatasi masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan.<sup>25</sup> *Kedua*, taktik. GSB menggunakan taktik yang mencerminkan orientasi ideologi gerakan. GSB cenderung untuk tetap di luar jalur politik normal dengan menggunakan taktik disruptif dan mobilisasi opini publik

dalam membentuk pengaruh politik dengan menggunakan bentuk demonstrasi yang cenderung dramatis dan direncanakan melalui representasi kostum dan simbol. *Ketiga*, struktur. GSB mengadopsi struktur yang diinginkan dari masing-masing gerakan. GSB cenderung memiliki struktur yang tidak kaku dalam menghindari sistem oligarki dengan melakukan rotasi kepemimpinan, anggota yang komunikatif dalam setiap isu, dan memiliki organisasi non permanen. GSB juga mendukung sikap anti birokrasi dalam melawan apa yang dianggap sebagai dehumanisasi karakter dari birokrasi modern, sehingga GSB menyuarakan dan menciptakan struktur yang responsif terhadap individu dengan bersifat terbuka, terdesentralisasi, dan non-hierarkis.<sup>26</sup> Cara-cara tersebut merupakan upaya untuk menghindari kemunduran gerakan sosial yang diakibatkan oleh kooptasi. Bukan berarti struktur yang sudah disebutkan sebelumnya diterapkan oleh seluruh GSB, seperti GSB dari *National Organization of Women* dan berbagai gerakan lingkungan yang cenderung tersentralisasi.<sup>27</sup> *Keempat*, partisipan. GSB membedakan dua kategori mengenai siapa partisipan dalam GSB. Kategori pertama, partisipan berasal dari kelas menengah baru yang muncul dalam sektor ekonomi non-produktif. Kategori kedua, partisipan dari gerakan sosial baru muncul tidak berdasarkan kelas, namun berdasarkan isu-isu sosial. Basis partisipan dari kategori kedua ini adalah ideologi, sehingga didefinisikan sebagai nilai-nilai umum tanpa terbatas pada struktur lokasi. Intinya, partisipan dari gerakan sosial tidak terbatas pada kelas-kelas tertentu dalam struktur sosial

<sup>22</sup> Frederick D. Miller, 'The end of SDS and the emergence of weatherman: Demise through success', *Waves of protest: Social movements since the Sixties* (Rowman & Littlefield Lanham, MD, 1999), hal. 303–24.

<sup>23</sup> Fuadi, Abdulloh & Tasmin Tasmin (2018). 'Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual', *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, vol. 1, no. 1, hal. 48–60. <http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4261>

<sup>24</sup> Nelson A. Pichardo, 'New social movements: A critical review', *Annual review of sociology*, vol. 23, no. 1 (Annual Reviews 4139 El Camino Way, PO Box 10139, Palo Alto, CA 94303-0139, USA, 1997), hal. 411–30.

<sup>25</sup> Oliveira, M., areosa, S., & Tirelli, C. (2021). *Movimento de Mulheres No Rs e Suapaticipacao Na Formacao da Agenda Governamental*, 14. <https://doi.org/10.32813/2179-1120.2021.V14.N1.A665>.

<sup>26</sup> Jurdi, H., & Ourahmoune, N. (2021). 'Revolution is a woman' - the feminisation of the Arab spring. *Journal of Marketing Management*, 37, 360 - 363. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2021.1880162>.

<sup>27</sup> Reger, J. (2018). *Gender in Movements.*, 537-547. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-76333-0\\_39](https://doi.org/10.1007/978-3-319-76333-0_39).

### Gerakan Sosial *International Women's Day* di Kota Semarang

*International Women's Day* (IWD) menjadi momentum yang digunakan oleh sebagian besar gerakan sosial yang berfokus mengenai kesetaraan gender di Indonesia untuk menyuarkan permasalahan terkait kesetaraan gender yang masih belum tercapai di Indonesia. Menurut Martha Kumala Dewi, sebagai salah satu pengurus gerakan sosial *International Women's Day* Semarang, gerakan IWD Semarang berawal dari jejaring yang dibangun oleh berbagai individu dari berbagai komunitas yang ada di Kota Semarang. Pada awalnya, IWD Semarang hanya sebatas nama grup yang digunakan oleh berbagai individu dari berbagai komunitas untuk menjadikan wadah dalam berdiskusi. Masuknya *Women's March* di Indonesia berawal dari gerakan *Women's March* Jakarta yang kemudian berkembang ke kota-kota lain. Berbeda dengan *Women's March*, IWD merupakan gerakan yang sudah dari lama dirayakan oleh perempuan di dunia dan dalam perkembangannya di Kota Semarang, IWD dianggap sebagai sebuah gerakan yang menjadi momentum dalam menyuarkan kesetaraan gender, bukan terinspirasi dari daerah tertentu, maupun organisasi tertentu. Pada tahun 2019, awalnya IWD hanya sebatas sebuah wadah dari berbagai individu yang berasal dari berbagai komunitas, meningkat menjadi sebuah gerakan sosial yang berawal dari individu-individu yang tergabung merasa diperlukannya sebuah gerakan yang memfasilitasi pembahasan mengenai isu-isu kesetaraan gender di Indonesia.

Sebelum melakukan aksi, pada tahun 2020 IWD Semarang melakukan berbagai kegiatan awal, seperti *screening* film, konsolidasi, dan diskusi dalam mencari apa isu yang akan diangkat, serta meningkatkan lingkup isu yang akan diangkat, karena isu-isu yang akan diangkat tentunya perlu untuk dilakukan diskusi serta kerja sama terhadap pihak-pihak yang menjadikan isu-isu tadi sebagai tujuan

gerakan. Pada 8 Maret 2020 IWD Semarang melakukan aksi dengan tuntutan. Pertama, tolak RUU bermasalah (*Omnibus Law* dan RUU Ketahanan Keluarga). Kedua, sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Pekerja Rumah Tangga. Ketiga, penuhi edukasi seks dalam institusi pendidikan dan permudah akses alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Keempat, hentikan operasi militer di Papua. Kelima, dukung otonomi perempuan atas tubuhnya. Keenam, permudah layanan BPJS. Ketujuh, cabut pasal karet UU ITE.

Di antara berbagai isu yang diperjuangkan oleh IWD Semarang, ketidaksetaraan gender menjadi salah satu isu yang terus diperjuangkan. Kekerasan seksual merupakan salah satu isu dari berbagai permasalahan dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Salah satu bukti nyata usaha IWD Semarang yakni dengan menuntut segera disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang kala itu masih berupa draft yang dinamakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS. Isu-isu yang diangkat setiap tahunnya terus menyuarkan tentang dukungan terhadap rancangan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan, stigma, diskriminasi, dan represi terhadap perempuan dari berbagai sektor kehidupan saat melakukan aksi di ruang publik. Isu yang diangkat tidak selalu yang berkaitan secara langsung dengan isu-isu perempuan. Isu seperti cabut UU ITE, dan tolak *Omnibus Law* dan UU Minerba merupakan isu yang meskipun secara tidak langsung gerakan IWD Semarang menganggap bahwa nantinya perempuan akan jadi bagian yang dirugikan pula oleh kebijakan-kebijakan yang menjadi isu atau tuntutan tersebut.

Pada awalnya, IWD Semarang memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah arena bagi berbagai individu dari berbagai komunitas di Kota Semarang dalam menyuarkan berbagai hak-hak perempuan di Kota Semarang. Dalam melakukan rekrutmen anggota, IWD Semarang berfokus menyediakan ruang aman bagi

masyarakat yang ingin menyuarakan pendapat mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Di saat yang sama, IWD dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperjuangkan kebijakan yang dianggap belum sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. IWD Semarang tidak melihat perbedaan ras, agama, dan gender dalam melakukan rekrutmen, melainkan berfokus kepada persamaan pandangan terkait kesetaraan gender. IWD Semarang menginginkan anggota yang tidak memiliki pandangan rasis maupun diskriminatif. IWD Semarang berusaha terbuka terhadap setiap orang yang ingin belajar mengenai gerakan berbasis gender. IWD Semarang melakukan berbagai acara secara terbuka untuk umum dan siapapun yang memiliki pemikiran terbuka dan keinginan untuk belajar, untuk bergabung di gerakan sosial ini.

Menurut Martha Kumala Dewi selaku anggota IWD Semarang, IWD Semarang memiliki dua strategi yang digunakan dalam menjalankan gerakan. Pertama, edukasi. Edukasi sendiri dibagi menjadi beberapa cara, yakni membangun ruang, diskusi, dan melakukan aksi. Membangun sebuah ruang disini berarti bahwa IWD Semarang membangun sebuah ruang yang dapat digunakan oleh anggota maupun jejaring yang memiliki kesamaan pandangan mengenai kesetaraan gender untuk saling melakukan pemberdayaan terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender dan dapat membawanya keluar untuk menyalurkan pemahaman kepada publik. Misalnya, IWD Semarang bekerja sama dengan suporter bola di Kota Semarang dengan bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi wanita di ranah sepak bola di Kota Semarang, baik di dalam tribun, maupun di luar tribun. IWD Semarang melakukan berbagai diskusi maupun cara-cara lainnya yang menjadikan perempuan mendapatkan kenyamanan yang sama dengan laki-laki. Sebagai contoh yakni menonton sepak bola, karena sepak bola

termasuk hiburan umum dan dilaksanakan di ruang publik, Ruang publik tersebut selayaknya menjadi ruang yang aman bagi perempuan. Isu-isu gender yang disalurkan kepada publik nantinya secara pelan-pelan dapat memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar individu yang menonton sepak bola dan menyadarkan bahwa seharusnya ruang publik menjadi tempat yang aman bagi setiap orang.

Selain dengan melakukan edukasi, IWD Semarang juga berfokus pada membangun jejaring. Jejaring dibangun atas dasar kedekatan dan persamaan pandangan dengan gerakan-gerakan lainnya. Pada awalnya, gerakan IWD Semarang sendiri hanyalah sebuah ruang bagi beberapa individu dari berbagai komunitas untuk dapat menyuarakan berbagai hal terkait dengan kesetaraan gender. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menyatukan pandangan. Menyatukan pandangan sendiri dilakukan dengan IWD Semarang yang berusaha membaaur dengan komunitas, sehingga IWD Semarang dapat menjadi rekan dari komunitas dalam menjalankan komunitasnya dan IWD Semarang dapat diterima dalam komunitas. IWD Semarang juga berhasil membangun jejaring melalui diskusi-diskusi yang kerap dilakukan.

Salah satu bentuk nyata jejaring yang dilakukan oleh IWD Semarang adalah dengan melakukan aksi *International Women's Day* Semarang bekerja sama dengan *Women's March* Semarang. Selain itu, IWD Semarang juga menyediakan berbagai workshop mengenai isu-isu gender. Membangun kerja sama dengan organisasi lain juga membantu IWD Semarang dalam menghadapi berbagai isu terkait dengan kesetaraan gender, salah satunya kekerasan seksual. Ada kalanya beberapa korban kekerasan seksual berusaha untuk menghubungi IWD Semarang untuk meminta bantuan. Dengan terjalannya jejaring yang dimiliki oleh IWD Semarang dengan LBH-LBH yang ada di Kota Semarang, IWD Semarang dapat menjadi penghubung para

korban terhadap lembaga bantuan hukum setempat sehingga korban dapat menerima bantuan terhadap isu yang sedang dihadapi.

Tidak hanya terbatas mengenai isu-isu terhadap perempuan, IWD Semarang juga membangun aksi solidaritas terhadap gerakan-gerakan lainnya mengenai isu-isu lainnya. Apabila suatu kebijakan dianggap tidak berpihak kepada publik, maka IWD Semarang akan mengambil langkah untuk tidak setuju kepada kebijakan tersebut dan kemudian mengambil langkah untuk bekerja sama dengan organisasi atau komunitas lain di Kota Semarang dan melakukan aksi tertentu. Sebagai contoh, IWD Semarang salah satu dari sekian banyak gerakan sosial yang menolak RUU (Omnibus) Cipta Kerja untuk disahkan. IWD Semarang juga mengangkat berbagai isu-isu terkait penangkapan mahasiswa yang diduga mengalami kriminalisasi di postingan Instagram IWD Semarang yang bekerja sama dengan LBH Semarang.

Dalam membentuk strategi, IWD Semarang berfokus kepada pengembangan diskusi yang bersifat internal. Diskusi internal adalah salah satu cara yang digunakan dalam mengembangkan komunikasi antara anggota agar menjadi lebih baik. Dengan banyaknya anggota dari IWD Semarang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai perspektif terhadap suatu isu tertentu. Diskusi secara internal dapat membentuk persamaan pandangan dan memudahkan gerakan IWD untuk lebih fokus terhadap tuntutan. Selain itu, pengembangan diskusi internal dapat menyamakan pendapat atas suatu isu sehingga mencegah miskomunikasi antar anggota sendiri maupun dengan pihak IWD Semarang sendiri terhadap pihak luar.

Membangun jejaring dengan berbagai organisasi dan komunitas yang memiliki ideologi maupun tujuan yang sama akan memudahkan advokasi dari sebuah gerakan sosial, tentunya diiringi tekanan yang semakin besar pula untuk sebuah gerakan sosial menjadi elemen penting dalam melakukan advokasi

kebijakan. Jejaring menjadi bagian penting dari IWD Semarang, karena kekuatan yang tercipta dari jejaring tadi akan membentuk sebuah kekuatan yang besar untuk menghadapi berbagai isu yang memerlukan kekuatan besar untuk dihadapi. Pembangunan jejaring juga diikuti dengan taktik dari IWD Semarang yang berusaha untuk membangun sebuah komunikasi yang baik dengan berbagai komunitas yang ada di Semarang yang bertujuan untuk memudahkan IWD Semarang untuk merangkul berbagai komunitas yang ada di Kota Semarang.

Perkembangan IWD Semarang terjadi tanpa campur tangan IWD lainnya yang ada di Indonesia. IWD Semarang terbentuk sebagai suatu kebutuhan akan ruang bagi para perempuan untuk menyuarakan terkait berbagai isu-isu tentang kesetaraan gender di Indonesia, khususnya di kota Semarang. Meskipun IWD Semarang bukanlah sebuah gerakan sosial yang muncul akibat pengaruh dari IWD di kota lain, IWD Semarang memiliki jejaring dengan berbagai gerakan gender di Indonesia. IWD Semarang bukan sebuah kegiatan yang dijalankan sebuah organisasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepengurusan yang bersifat tetap, sifatnya hanya sebagai koordinator gerakan. Meskipun begitu, IWD Semarang tidak terpaku terhadap figur-figur tertentu dalam perjalanan gerakan sosialnya, sehingga ketika figur-figur tertentu dianggap memiliki peran penting berhalangan untuk hadir atau berhenti untuk aktif dalam gerakan, maka dapat digantikan oleh figur-figur lainnya.

Keberadaan pengurus dalam IWD Semarang bisa berganti mengikuti dengan kebutuhan gerakan sosial yang ada. Menurut Nurul Ichlasiah Jaya, koordinator dari sebuah kegiatan dalam IWD Semarang ditentukan secara sukarela berdasarkan keinginan dari masing-masing individu dalam IWD Semarang. Misalnya, ketika akan melakukan aksi *International Women's Day*, melalui konsolidasi, anggota dibebaskan mengambil bagian berdasarkan inisiatif masing-masing

sebagai kontributor dari beberapa divisi. Meskipun begitu, pada pertemuan terakhir IWD Semarang terdapat sebuah poin penting dimana gerakan sosial mempertimbangkan untuk memiliki sebuah struktur. Namun, struktur yang dimaksud masih dipertimbangkan apakah sebuah struktur yang bersifat kaku atau hanya dibutuhkan narahubung yang bersifat tetap.

Struktur kepengurusan yang berubah-ubah, meskipun telah ada pembagian peran antar anggota menyebabkan belum adanya bentuk “tanggung jawab yang memaksa” bagi anggota IWD Semarang untuk menjadikan IWD Semarang sebagai prioritas utama. Menurut Febriani, berdasarkan teori mobilisasi massa, sebuah organisasi yang formal berperan penting dalam gerakan sosial dikarenakan gerakan sosial dapat memiliki sumber daya yang terorganisir dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan gerakan sosial.<sup>28</sup> Berdasarkan beberapa data di atas, dapat disimpulkan bahwa IWD Semarang sudah berada pada tahap birokratisasi, meskipun belum sempurna. Hal ini dikarenakan IWD Semarang sejak awal sudah tidak bergantung terhadap figur-figur tertentu dalam menjalankan gerakan sosial. Meskipun begitu, untuk dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial yang sudah berada pada tahap birokratisasi yang sempurna, IWD Semarang memerlukan sebuah struktur dalam bentuk tetap seperti sebuah organisasi dikarenakan kebutuhan agar terdapat figur-figur yang menjadikan IWD Semarang sebagai sebuah gerakan sosial yang utama dan sebagai gerakan sosial yang memiliki tujuan dan target yang jelas dengan figur-figur yang terdapat dalam struktur nantinya dapat merencanakan apa saja target yang diperlukan.

Sebuah gerakan sosial akan mengalami kemunduran yang ditandai dengan lima faktor.

Berkurangnya pengaruh gerakan sosial terhadap masyarakat dapat diidentifikasi melalui: 1) gerakan yang oleh gerakan yang sudah sukses, 2) gerakan yang mengalami kegagalan, 3) gerakan mengalami *cooptation* yang ditandai dengan ketergantungan terhadap figur-figur tertentu sehingga melupakan tujuan gerakan, 4) gerakan mengalami represi dari pihak-pihak tertentu, dan/atau 5) gerakan menjadi arus utama.

Faktor pertama yakni gerakan yang sudah sukses, karena sebuah gerakan sosial telah berhasil mencapai tujuan. Menurut Nurul Ichlasiah Jaya selaku pengurus IWD Semarang, gerakan sosial sendiri masih jauh dari kata sukses, karena tujuan awal gerakan sosial IWD Semarang, yakni kesetaraan gender belum tercapai. Fakta tersebut berdasarkan data Kementerian PPPA pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa masih terdapat 27 provinsi yang belum mencapai target Kementerian PPPA, dimana Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang belum mencapai target yang diharapkan Kementerian PPPA. Dalam lingkup gerakan sosial oleh IWD Semarang, gerakan yang dilakukan masih bersifat momentual, bahkan seremonial dan berfokus pada peringatan *International Women's Day* saja. Langkah atau strategi tertentu dalam mengatasi permasalahan gerakan belum jelas, sehingga masih sebatas momentual. Para anggota IWD Semarang sendiri menganggap bahwa gerakan yang bersifat momentual karena gerakannya bersifat “kurang mengikat anggota” untuk berfokus memenuhi tujuan dari IWD Semarang. Para anggota berfokus untuk berjejaring dengan organisasi atau komunitas lainnya, sehingga kurang fokus pada pencapaian tujuan gerakan. IWD Semarang juga belum memiliki strategi atau target dalam jangka pendek maupun menengah dalam rangka mencapai tujuan dari gerakan.

Faktor kedua, kegagalan. Dalam gerakan IWD Semarang sendiri, *factionalism* tidak terjadi dalam gerakan. Meskipun gerakan terus

<sup>28</sup> Febriani, Luna. "Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi." *Society*, vol. 5, no. 1, 2017, hal. 59-67, <https://doi.org/10.33019/society.v5i1.20>.

## DINAMIKA PERJUANGAN KESETARAAN GENDER MASYARAKAT URBAN

Bayu Anang Prihanto, Ambar Widaningrum

tumbuh dari tahun ke tahun dan diiringi pula dengan bertambahnya anggota, serta masuknya berbagai anggota dengan ideologi feminisme yang beragam, nyatanya IWD Semarang tidak mengalami perpecahan hingga berbagai faksi dan menghambat gerakan. Namun, inkonsistensi menjadi permasalahan dalam organisasi dan kurang terencananya tujuan dan target dari gerakan. IWD Semarang sendiri tidak sampai pada tahapan kegagalan yang disebabkan oleh *encapsulation*. IWD Semarang masih berjejaring dengan berbagai komunitas dan organisasi gender lainnya. Penyebab dari kegagalan IWD Semarang sendiri disebabkan lebih kepada gagalnya organisasi dalam menentukan tujuan jangka pendek dan panjang dari organisasi, sehingga aksi-aksi yang dilakukan hanya bersifat seremonial semata.

Faktor ketiga, yakni kooptasi. Pada IWD Semarang sendiri, karena gerakan sudah sejak awal tidak bergantung terhadap figur-figur tertentu meskipun figur dominan pasti selalu ada dalam organisasi, maka tidak terjadi kebergantungan terhadap figur-figur tertentu dalam IWD Semarang. Kooptasi dalam IWD Semarang juga diatasi dengan anggota yang dapat saling mengisi peran satu sama lain apabila terjadi kekosongan peran ketika anggota yang seharusnya mengisi berhalangan untuk ikut serta. Langkah ini menjadi hal yang wajib bagi IWD Semarang sejak awal berdirinya gerakan, karena gerakan menganggap apabila terjadi kebergantungan terhadap figur tertentu, apabila figur tersebut meninggalkan IWD Semarang akan menyusahkan gerakan untuk melakukan regenerasi.

Faktor keempat, yakni represi. Selama gerakan IWD Semarang berlangsung, belum terdapat represi atau tekanan dari otoritas terhadap IWD Semarang. IWD Semarang melakukan komunikasi terhadap otoritas apabila melakukan aksi yang dilakukan di jalan, seperti ketika perayaan *International Women's Day*. Martha Kumala Dewi menganggap bahwa represi, intimidasi,

maupun tidak memiliki ruang untuk bersuara lebih dialami oleh komunitas atau kelompok LGBTQ, HIV AIDS, difabel, serta Komunitas Perempuan dan Napza. Contoh dari represi tersebut adalah Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) yang mengatakan bahwa perempuan masih mendapatkan represi dari pihak otoritas ketika melakukan rehabilitasi. UU Narkotika yang selama ini diterapkan dianggap kurang membantu perempuan dalam mendapatkan jaminan keamanan ketika melakukan rehabilitasi. Dari kelompok LGBTQ sendiri, pihak otoritas kerap membatasi kelompok LGBTQ untuk melakukan aksi, maupun melakukan represi ketika berkumpul di ruang privat. Untuk komunitas difabel sendiri, meskipun telah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai ruang publik yang aman bagi difabel, nyatanya masih banyak fasilitas publik yang belum ramah bagi difabel. Berbagai fasilitas, seperti trotoar sendiri masih tidak sesuai dengan standar yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.

Faktor kelima, yakni menjadi arus utama. IWD Semarang sendiri masih belum mencapai tahap dimana gerakan menjadi arus utama. Meskipun UU TPKS sudah disahkan, nyatanya masih terjadi berbagai permasalahan mengenai gender yang terdapat pada ruang publik. Baik permasalahan gender yang terletak pada pendidikan, seperti masih kurangnya akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berbagai permasalahan lainnya menandakan bahwa belum dapat dikatakan bahwa gerakan diadopsi untuk menjadi arus utama.

Dalam menjalankan aktivitasnya, setiap gerakan sosial memiliki taktik masing-masing. Taktik menjadi karakteristik yang membedakan antar gerakan satu dengan gerakan lainnya. Menurut Singh, GSB cenderung menggunakan taktik disruptif dan memobilisasi opini publik dalam rangka mendapatkan daya tawar

politik.<sup>29</sup> IWD Semarang berusaha untuk mengubah opini publik dengan perlahan dengan melakukan demonstrasi sekaligus merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk menyuarakan terkait kesetaraan gender. IWD Semarang berusaha menciptakan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat mengenai berbagai isu, khususnya seputar gender. Sedangkan untuk taktik disruptif, IWD Semarang memanfaatkan berbagai media, seperti media sosial untuk mengangkat isu-isu yang penting untuk diangkat. Bentuk disruptif yang tersaji sendiri berupa kritik. Misalnya, IWD Semarang membantu Ravio Putra yang menjadi korban kriminalisasi setelah melakukan kritik terhadap staf khusus presiden. Bentuk bantuan yang diberikan sendiri salah satunya berupa mengunggah dukungan untuk membebaskan Ravio Putra dari kriminalisasi, mengangkat tagar berupa #BebaskanRavio, serta mengunggah foto yang berisi bahwa kriminalisasi masih menghantui di Indonesia.

Sebagai sebuah gerakan sosial, IWD Semarang sendiri tidak memiliki sebuah struktur yang kaku. Hal ini menyebabkan IWD Semarang belum memiliki kepengurusan yang bersifat tetap. Keuntungan dengan tidak memiliki struktur yang tetap menyebabkan IWD Semarang tidak bergantung terhadap figur-figur yang dominan, sehingga jika terdapat kekosongan peran akibat berhalangan hadir, maka dapat digantikan dengan anggota lain yang siap untuk mengisi. Tidak adanya struktur yang tetap juga dianggap mempermudah gerakan sosial untuk melakukan regenerasi. Struktur digunakan apabila akan dilakukan sebuah kegiatan maupun aksi yang membutuhkan untuk menetapkan pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab kegiatan dan menyesuaikan dengan kebutuhan ketika terjadi kegiatan.

IWD Semarang didukung oleh berbagai kalangan, baik individu maupun organisasi dan komunitas. Terlepas dari berbagai perbedaan, berbagai individu turut bergabung dalam gerakan sosial ini. Individu yang bergabung tidak terbatas hanya kepada masyarakat Kota Semarang, namun terdapat pula anggota yang berasal dari berbagai kemahasiswaan dari berbagai universitas yang mengirimkan perwakilannya ke IWD Semarang. Selain itu, IWD Semarang juga memiliki jejaring dengan berbagai komunitas di Kota Semarang, seperti komunitas musik, komunitas difabel, supporter bola, dan komunitas HIV AIDS. Terdapat pula berbagai LBH yang turut bekerja sama dengan IWD Semarang.

### Kesimpulan

Meskipun beberapa kebijakan pro-perempuan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal (daerah) melalui program-program pengarusutamaan gender, kebijakan-kebijakan tersebut seringkali tidak terimplementasi dengan baik. Munculnya gerakan sosial *International Women's Day* berawal dari konflik kebijakan yang terletak pada lemahnya kebijakan mengenai kesetaraan gender yang disebabkan ketidakpastian dan ketidaksepakatan nilai yang muncul akibat benturan antara ide dan nilai. Kegagalan penegakan aturan untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan dan kurangnya upaya nyata untuk memastikan kesetaraan gender di berbagai sektor menciptakan kesenjangan yang sulit diatasi. Untuk mencapai hasil yang signifikan, diperlukan komitmen yang lebih kuat dan tindakan nyata.

Berdasarkan pembahasan atas temuan-temuan studi ini, dapat dijelaskan bahwa meskipun kesadaran masyarakat tentang masalah gender telah berubah, masih banyak anggota masyarakat yang kurang menyadari pentingnya kesetaraan gender. Pendidikan masyarakat tentang manfaat kesetaraan gender dan hak-hak perempuan harus ditingkatkan. Gerakan sosial seperti IWD merupakan contoh

---

<sup>29</sup> Rajendra Singh, 'Gerakan sosial baru', Yogyakarta: Resist Book (2010).

## DINAMIKA PERJUANGAN KESETARAAN GENDER MASYARAKAT URBAN

Bayu Anang Prihanto, Ambar Widaningrum

nyata bahwa kemunduran gerakan sudah terjadi, sebelum kesadaran gender memasuki tahapan arus utama. Dengan demikian, IWD akan sulit mencapai tujuannya jika tidak didukung oleh masyarakat secara aktif. Gerakan sosial seringkali berhasil karena kombinasi taktik yang cerdas, dukungan luas, ketahanan terhadap perubahan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan hambatan. Kurangnya strategi dan taktik seperti ini menyebabkan IWD Semarang mengalami kemunduran. Mulai dari tahap penggabungan hingga kemundurannya, IWD Semarang memiliki kekurangan utama yaitu pada tahap birokratisasi, yang tidak dilakukan atas dasar kebersamaan dan solidaritas. Target serta indikator pencapaian dari IWD belum terdefinisi dengan jelas. Meskipun demikian, keberadaan IWD Semarang memberikan sebuah harapan dan angin segar atas bangkitnya pola pikir kritis perempuan untuk tidak bersikap apolitis dan melawan segala bentuk penindasan. Berhasil maupun tidak dalam memberikan perubahan, IWD Semarang tetap menjadi sebuah gerakan yang mewarnai bentuk perlawanan perempuan terhadap kondisi masyarakat yang masih patriarki.

Perjuangan untuk kesetaraan gender tidak harus berhenti meskipun gerakan IWD menghadapi kegagalan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk mencapai perubahan yang menguntungkan dalam mengurangi ketidaksetaraan gender di Indonesia. Tindakan konkret, perubahan budaya, dan peningkatan kesadaran menjadi keharusan. Ketidakhahaman atau ketidaksetujuan dapat muncul karena kesalahan dalam menyampaikan pesan gerakan kepada masyarakat. Gerakan dapat terganggu oleh pesan yang tidak jelas atau ambigu. Oleh karena itu, IWD perlu mengoptimalkan media sosial dan platform online untuk menyebarkan pesan kesetaraan gender. Untuk melakukan ini, IWD juga perlu melibatkan para influencer, dan tokoh masyarakat untuk mendukung gerakannya. Selanjutnya, sebagai suatu

gerakan, membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur pengaruh program kesetaraan gender yang dijalankan akan mempermudah upaya mitigasi hambatan sekaligus untuk membangun strategi dan taktik baru di aktivitas-aktivitas gerakan selanjutnya.

Adanya sebuah struktur gerakan yang jelas diperlukan dalam sebuah gerakan sosial untuk mempermudah gerakan dalam proses penentuan tujuan, target dan indikator capainnya dalam mewujudkan visi misi gerakan. Untuk itu, diperlukan studi lanjutan yang membahas mengenai model kelembagaan dan struktur yang tepat bagi gerakan sosial seperti IWD Semarang. Dengan kelembagaan dan struktur yang jelas, target dan indikator capaian gerakan sosial juga menjadi lebih terarah sehingga dapat membantu gerakan dalam mencapai kesetaraan gender dalam kebijakan publik. IWD khususnya di tingkat lokal tetap perlu memiliki sistem pembagian kerja yang jelas. Hal tersebut juga dapat meningkatkan solidaritas dan meningkatkan efisiensi dari gerakan. Penting untuk diingat bahwa setiap gerakan sosial memiliki konteks dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kelembagaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi khusus masyarakat tempat gerakan tersebut berkembang. Peran pemerintah diperlukan terutama pada fasilitasi dan infrastruktur kebijakan terkait dengan penguatan aktivitas advokasi kesetaraan gender.

## Daftar Pustaka

- Clayton, Dewey M., (2018) 'Black Lives Matter and the Civil Rights Movement: A Comparative Analysis of Two Social Movements in the United States', *Journal of Black Studies*, vol. 49, no. 5, hal. 448–80. <https://doi.org/10.1177/0021934718764099>
- Edwards, Louise (2016). 'International Women's Day in China: Feminism Meets Militarised Nationalism and Competing Political Party Programs', *Asian Studies Review*, vol. 40, no. 1, Taylor & Francis, hal. 89–105.
- Fauzi, Aziz, Andayani Andayani & Muhammad Rohmadi (2021). 'Measuring the Use of Politeness in Language on the Demonstration Poster International Women's Day 2020 (Pragmatic Studies)', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 8, no. 6, hal. 77–88. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i6.2649>
- Febriani, Luna. "Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi." *Society*, vol. 5, no. 1, 2017, hal. 59-67, <https://doi.org/10.33019/society.v5i1.20>.
- Felmlee DH, Blanford JI, Matthews SA, & MacEachren AM (2020) The geography of sentiment towards the Women's March of 2017. *PLoS ONE* 15(6): e0233994. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233994>
- Freeman, Jo (1999). 'On the origins of social movements', dalam *Wave of Protest: Social movements since the sixties*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Fuadi, Abdulloh & Tasmin Tasmin (2018). 'Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual', *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, vol. 1, no. 1, hal. 48–60. <http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4261>
- Greene, Robert W. dan J. Shepard (2003), 'Sociology and you', Ohio: Glencoe Mc Graw-Hill.
- Hwang, S., & Wu, W. (2019). Social capital and feminist power: promoting gender mainstreaming in Taiwan. *International Feminist Journal of Politics*, 21, 724 - 745. <https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1606724>.
- Jurdi, H., & Ourahmoune, N. (2021). 'Revolution is a woman' - the feminisation of the Arab spring. *Journal of Marketing Management*, 37, 360 - 363. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2021.1880162>.
- Khan, Naushad & Hassan, Absar Ul and Fahad, Shah and Faisal, Shah and Naushad, Mahnoor (2020). *Analysis of Women March Day in the World and Its Impact on Women Culture in Pakistan* <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3551488>
- Krutílková, H. (2021). International Women's Day and its role in the consolidation of the female socialist worker's movement in Moravia before 1914. *UR Journal of Humanities and Social Sciences*. No. 2 (19), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, hal. 77–99.
- Larasati, Ira & Pudji Astuti (2019). 'Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru: membongkar konstruksi maskulinitas untuk mewujudkan keadilan gender', *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 8, no. 02, hal. 211–20.
- Lexy, J. Moleong (2002) *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

## DINAMIKA PERJUANGAN KESETARAAN GENDER MASYARAKAT URBAN

Bayu Anang Prihanto, Ambar Widaningrum

- Locher, David A. (2002), *Collective behavior*, NJ: Prentice Hall Upper Saddle River.
- Macionis, John J (2018). *Sociology.(Global Edition)*, Edisi ke 16. UK: Pearson.
- Manulu, Dimpos (2016), ‘Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea, Sumatera Utara’, *Populasi*, vol. 18, no. 1.
- McAdam, Doug & Sidney Tarrow (2018), *The political context of social movements. The Wiley Blackwell companion to social movements*, Wiley Online Library, hal. 17–42.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, Sage Publication.
- Miller, Frederick D (1999). ‘The end of SDS and the emergence of weatherman: Demise through success’, dalam *Waves of protest: Social movements since the Sixties*, Rowman & Littlefield Publisher, hal. 303–24.
- Oliveira, M., Areosa, S., & Tirelli, C. (2021). Movimento de Mulheres No Rs e Suapaticipacao Na Formacao da Agenda Governamental, 14. <https://doi.org/10.32813/2179-1120.2021.V14.N1.A665>.
- Pamela Moss & Avril Maddrell (2017). Emergent and divergent spaces in the Women’s March: the challenges of intersectionality and inclusion. *Gender, Place & Culture*, 24:5, 613-620, <https://doi.org/10.1080/0966369X.2017.1351509>
- Perez, Olivia Cristina, Joana Tereza Vaz de Moura, & Caroline Bandeira de Brito Melo (2023). ‘Protests for Women’s Rights and against the Bolsonaro Administration’, *Latin American Perspectives*, Los Angeles: Sage Publication.
- Pichardo, Nelson A (1997). ‘New social movements: A critical review’, *Annual review of sociology*, vol. 23, no. 1, Annual Reviews 4139 El Camino Way, Palo Alto, CA 94303-0139, USA, hal. 411–30.
- Piven, Frances Fox & Richard Cloward (2012). *Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail*, New York: Vintage.
- Prasisko, Yongky Gigih (2016). ‘Gerakan Sosial Baru Indonesia: reformasi 1998 dan proses demokratisasi indonesia’, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, vol. 3, no. 2, hal. 9–16. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>
- Rademacher, H. (2020). Transnational social movement organizations and gender mainstreaming bureaucracies: an event history analysis, 1981-1998. *International Journal of Sociology*, 50, 445 - 472. <https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1812259>.
- Reger, J. (2018). *Gender in Movements*. Hal. 537-547. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-76333-0\\_39](https://doi.org/10.1007/978-3-319-76333-0_39).
- Ruthchild, Rochelle Goldberg, ‘From West to East: International Women’s Day, the First Decade’, *Aspasia*, vol. 6, no. 1, *Berghahn Journals*, hal. 1–24. <https://doi.org/10.3167/asp.2012.060102>
- Sakina, Ade Irma (2017). ‘Menyoroti budaya patriarki di Indonesia’, *Share: Social Work Journal*, vol. 7, no. 1, hal. 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sari, M., Jatningsih (2018). Green and Clean as Issue on Women's Movement in Surabaya. *Proceedings of the 1st*

*International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*  
<https://doi.org/10.2991/ICSS-18.2018.47>.

Singh, Rajendra (2010). 'Gerakan Sosial Baru', Yogyakarta: Resist Book.

Sukmana, Oman (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Intrans Publishing.

Yaka, Ö. (2019). Gender and framing: Gender as a main determinant of frame variation in Turkey's anti-hydropower movement. *Women's Studies International Forum*.  
<https://doi.org/10.1016/J.WSIF.2019.03.002>.